

MANAJEMEN PENDIDIKAN

Mohamad Mustari, Ph.D.
M. Taufiq Rahman, Ph.D.

RajaGrafiKa Persada

Jakarta

2014

ISBN: 9789797697754

MANAJEMEN PENDIDIKAN DI ERA GLOBALISASI

A. Globalisasi Pendidikan

1. Pengertian Globalisasi Pendidikan

Globalisasi didefinisikan sebagai semua proses yang merujuk kepada penyatuan seluruh warga dunia menjadi sebuah kelompok masyarakat global. Namun, pada kenyataannya globalisasi merupakan penyatuan semu, karena nilai-nilai ekonomi, sosial, dan budaya didominasi nilai-nilai yang sebenarnya asing bagi masyarakat dunia.

Globalisasi sering diterjemahkan “mendunia”. Suatu entitas, betapapun, dimanapun, kapanpun, dengan cepat menyebar ke seluruh pelosok dunia, baik berupa ide, gagasan, data, informasi, produksi, pembangunan, pemberontakan, dan sebagainya, begitu disampaikan, saat itu pula diketahui oleh semua orang di dunia.

Kekuatan globalisasi menurut analisis para ahli pada umumnya bertumpu pada 4 kekuatan global, yaitu:

- a. Kemajuan iptek terutama dalam bidang informasi dan inovasi-inovasi baru di dalam teknologi yang mempermudah kehidupan manusia.
- b. Perdagangan bebas yang ditunjang oleh kemajuan iptek.
- c. Kerjasama regional dan internasional yang telah menyatukan kehidupan bersama dari bangsa-bangsa tanpa mengenal batas negara.
- d. Meningkatnya kesadaran terhadap hak-hak asasi manusia serta kewajiban manusia di dalam kehidupan bersama, dan sejalan dengan itu semakin meningkatnya kesadaran bersama dalam alam demokrasi.

Kemajuan iptek yang disertai dengan semakin kencangnya arus globalisasi dunia membawa dampak tersendiri bagi dunia pendidikan. Sebagai contoh, berbagai jenjang pendidikan mulai dari sekolah menengah hingga perguruan tinggi baik negeri maupun swasta membuka program kelas internasional. Hal ini

dilakukan untuk menjawab kebutuhan pasar akan tenaga kerja berkualitas yang semakin ketat. Inilah yang dimaksud dengan globalisasi pendidikan.

Dampak positif globalisasi pendidikan:

- a. Semakin mudahnya akses informasi.
- b. Globalisasi dalam pendidikan akan menciptakan manusia yang professional dan berstandar Internasional dalam bidang pendidikan.
- c. Globalisasi akan membawa dunia pendidikan Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain.
- d. Globalisasi akan menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing.
- e. Adanya perubahan struktur dan sistem pendidikan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan karena perkembangan ilmu pengetahuan dalam pendidikan akan sangat pesat.

Dampak negatif globalisasi pendidikan:

- a. Dunia pendidikan Indonesia bisa dikuasai oleh para pemilik modal.
- b. Dunia pendidikan akan sangat tergantung pada teknologi, yang berdampak munculnya “tradisi serba instant”.
- c. Globalisasi akan melahirkan golongan-golongan di dalam dunia pendidikan.
- d. Semakin terkikisnya kebudayaan akibat masuknya budaya dari luar.
- e. Globalisasi mengakibatkan melonggarnya kekuatan kontrol pendidikan oleh negara.

2. Pendidikan Berwawasan Global

Dalam menghadapi globalisasi tanpa adanya persiapan yang kuat maka globalisasi akan menjadi sesuatu yang menakutkan dan akan berubah menjadi sesuatu yang negatif. Cara untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi globalisasi ini adalah dengan cara meningkatkan kesadaran dan memperluas wawasan. Cara untuk meningkatkan dan memperluas wawasan dapat dilakukan dengan berbagai cara, dan cara yang paling efektif adalah melalui pendidikan.

Peningkatan kualitas pendidikan bagi suatu bangsa, bagaimanapun mesti diprioritaskan. Sebab kualitas pendidikan sangat penting artinya, karena hanya manusia yang berkualitas saja yang bisa bertahan hidup di masa depan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk peningkatan kualitas pendidikan tersebut adalah dengan pengelolaan pendidikan dengan wawasan global.

Meningkatkan dan memperluas wawasan global merupakan unsur penting untuk memahami masalah global. Agar dapat meningkatkan wawasan global, maka pendidikan memegang peranan penting. Melalui pendidikan maka seseorang harus mampu mengembangkan 4 hal berikut:

- 1) Kemampuan mengantisipasi (*anticipate*), artinya pendidikan berusaha menyiapkan anak didik untuk dapat mengantisipasi perkembangan IPTEK yang begitu cepat.
- 2) Mengerti dan mengatasi situasi (*cope*), artinya dapat mengembangkan kemampuan dan sikap peserta didik untuk menangani dan berhadapan dengan situasi baru. Rasa kepedulian terhadap suatu masalah serta keinginan untuk mengatasi masalah merupakan faktor yang harus dikembangkan pada diri anak.
- 3) Mengakomodasi (*accommodate*), artinya dapat mengakomodasi perkembangan IPTEK yang pesat dan segala perubahan yang ditimbulkannya. Dalam mengatasi (*cope*) dan mengakomodasi (*accommodate*) perlu dikembangkan sikap bahwa anak didik tidak larut oleh perubahan, tetapi ia harus mampu mengikuti dan mengendalikan perubahan agar tumbuh menjadi suatu yang positif dan bermanfaat bagi kehidupan.
- 4) Mereorientasi (*reorient*), artinya persepsi dan wawasan tentang dunia perlu diorientasikan kembali karena perkembangan IPTEK dan perubahan sosial yang cepat sehingga memperoleh wawasan yang semakin luas.

Perspektif global merupakan pandangan yang timbul dari kesadaran bahwa dalam kehidupan ini segala sesuatu selalu berkaitan dengan isu global. Orang sudah tidak memungkinkan lagi bisa mengisolasi diri dari pengaruh global. Manusia merupakan bagian dari pergerakan dunia, oleh karena itu harus memperhatikan kepentingan sesama warga dunia. Tujuan umum pengetahuan tentang perspektif global adalah selain untuk menambah wawasan juga untuk menghindarkan diri dari cara berpikir sempit, terkotak oleh batas-batas subyektif, primordial (lokalitas) seperti perbedaan warna kulit, ras, nasionalisme yang sempit, dsb.

Dengan demikian, pentingnya wawasan perspektif global dalam pengelolaan pendidikan ialah sebagai langkah upaya dalam peningkatan mutu pendidikan nasional. Hal ini dikarenakan seperti yang telah dituliskan sebelumnya, dengan wawasan perspektif global kita dapat menghindarkan diri dari cara berpikir sempit dan terkotak-kotak oleh batas subyektif sehingga pemikiran kita lebih berkembang. Kita dapat melihat sistem pendidikan di negara lain yang telah maju dan berkembang. Dapat membandingkannya dengan pendidikan di negara kita, mana yang dapat diterapkan dan mana yang sekerdar untuk diketahui saja. Kita bisa mencontoh sistem pendidikan yang baik di negara lain selama hal itu tidak bertentangan dengan jati diri bangsa Indonesia.

Pendidikan yang berwawasan global dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pendidikan kurikuler dan pendidikan reformatif.

a. Perspektif Kurikuler

Berdasarkan perspektif kurikuler, pendidikan berwawasan global merupakan suatu proses pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga terdidik kelas menengah dan professional dengan meningkatkan kemampuan individu dalam memahami masyarakatnya dalam kaitannya dengan kehidupan masyarakat dunia, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Mempelajari budaya, sosial, politik dan ekonomi bangsa lain dengan titik berat memahami adanya saling ketergantungan.
- 2) Mempelajari berbagai cabang ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sesuai dengan kebutuhan lingkungan setempat.
- 3) Mengembangkan berbagai kemungkinan berbagai kemampuan dan keterampilan untuk bekerjasama guna mewujudkan kehidupan masyarakat dunia yang lebih baik.

Berdasarkan perspektif kurikuler, pengembangan pendidikan berwawasan global memiliki implikasi ke arah perombakan kurikulum pendidikan. Mata pelajaran dan mata kuliah yang dikembangkan tidak lagi bersifat monopolitik melainkan lebih banyak yang bersifat integratif. Dalam arti, mata kuliah lebih ditekankan pada kajian yang bersifat multidisipliner, interdisipliner, dan transdisipliner.

b. Perspektif Reformasi

Berdasarkan perspektif reformasi pendidikan berwawasan global merupakan suatu proses pendidikan yang dirancang untuk mempersiapkan anak didik dengan kemampuan dasar intelektual dan tanggung jawab guna memasuki kehidupan yang bersifat kompetitif dan dengan derajat saling menggantungkan antar bangsa yang sangat tinggi. Pendidikan harus mengkhaitkan proses pendidikan yang berlangsung di sekolah dengan nilai-nilai yang selalu berubah di masyarakat global. Dengan demikian, sekolah harus memiliki orientasi nilai, di mana masyarakat tersebut harus selalu dikaji dalam kaitannya dengan masyarakat dunia.

Implikasi dari pendidikan berwawasan global menurut perspektif reformasi tidak hanya bersifat perombakan kurikulum, tetapi juga merombak sistem, struktur dan proses pendidikan. Pendidikan dengan kebijakan dasar sebagai kebijakan sosial tidak lagi cocok bagi pendidikan berwawasan global. Pendidikan berwawasan global harus merupakan kombinasi antara kebijakan yang

mendasarkan pada mekanisme pasar. Maka dari itu, sistem dan struktur pendidikan harus bersifat terbuka, sebagaimana layaknya kegiatan yang memiliki fungsi ekonomis.

Kebijakan pendidikan yang berada di antara kebijakan sosial dan mekanisme pasar, memiliki arti bahwa pendidikan tidak semata-mata di tata dan diatur dengan menggunakan perangkat aturan sebagaimana yang berlaku sekarang ini, serba seragam, rinci dan instruktif. Tetapi pendidikan juga di atur layaknya suatu Mall, adanya kebebasan pemilik toko untuk menentukan barang apa yang akan dijual, bagaimana akan dijual dan dengan harga berapa barang akan dijual. Pemerintah tidak perlu mengatur segala sesuatu dengan rinci.

Selain itu, pendidikan berwawasan global bersifat sistemik organik, dengan ciri-ciri fleksibel-adaptif dan kreatif demokratis. Bersifat sistemik-organik artinya bahwa sekolah merupakan sekumpulan proses yang bersifat interaktif yang tidak bisa dilihat sebagai-hitam putih, tetapi setiap interaksi harus dilihat sebagai satu bagian dari keseluruhan interaksi yang ada.

Fleksibel-adaptif, artinya bahwa pendidikan lebih ditekankan sebagai suatu proses *learning* daripada *teaching*. Anak didik dirangsang untuk memiliki motivasi untuk mempelajari sesuatu yang harus dipelajari dan *continues learning*. Tetapi, anak didik tidak akan dipaksa untuk dipelajari. Sedangkan materi yang dipelajari bersifat *integrated*, materi satu dengan yang lain dikaitkan secara padu dan dalam *open-system environment*. Pada pendidikan tersebut karakteristik individu mendapat tempat yang layak.

Kreatif demokratis, berarti pendidikan senantiasa menekankan pada suatu sikap mental untuk senantiasa menghadirkan suatu yang baru dan orisinal. Secara paedagogis, kreativitas dan demokrasi merupakan dua sisi dari mata uang. Tanpa demokrasi tidak akan ada proses kreatif, sebaliknya tanpa proses kreatif demokrasi tidak akan memiliki makna.

3. Globalisasi dan Manajemen Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek penting dalam era globalisasi. Tiga persoalan ini sangat berpengaruh dalam perkembangan dunia pendidikan. Sebab peningkatan SDM, yang menjadi tugas dan tanggung jawab utama pendidikan, sangat dipengaruhi faktor globalisasi dan teknologi. Pengaruh globalisasi, kemajuan teknologi dan informasi serta perubahan nilai-nilai sosial harus diperhitungkan dalam penyelenggaraan pendidikan, apalagi tanggung jawab dunia pendidikan untuk mencapai tujuan pokok melahirkan manusia yang berkualitas.

Pendidikan mulai diperhitungkan lebih serius sebagai tonggak utama dalam pertumbuhan dan pembangunan dalam konsepsi *knowledge economy*, terutama karena terjadinya pergeseran besar dari orientasi kerja otot (*muscles work*) ke kerja mental (*mental works*). Dalam konsepsi ini, peranan dan penguasaan informasi sedemikian vitalnya, sehingga kebutuhan dalam proses pengumpulan, penyaringan, dan analisa informasi menjadi sedemikian penting.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disertai dengan semakin kencangnya arus globalisasi dunia membawa dampak tersendiri bagi dunia pendidikan. Teknologi berkembang sangat pesat, pemerintah juga jadi kerepotan dan akhirnya mengubah kurikulum pendidikan di Indonesia disesuaikan dengan tuntutan era globalisasi.

Perkembangan globalisasi pun telah menuntut pihak sekolah lebih sibuk dari era sebelumnya. Demikian karena pihak sekolah sendiri sudah mulai melakukan globalisasi dalam sistem pendidikan internal sekolah. Hal ini terlihat pada sekolah-sekolah yang dikenal dengan *bilingual school*, dengan diterapkannya bahasa asing seperti bahasa Inggris dan bahasa Mandarin sebagai mata ajar wajib sekolah. Selain itu berbagai jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang membuka program kelas internasional. Globalisasi pendidikan dilakukan untuk menjawab kebutuhan pasar akan tenaga kerja berkualitas yang semakin ketat. Dengan globalisasi pendidikan diharapkan tenaga kerja Indonesia dapat bersaing di pasar dunia. Apalagi dengan akan diterapkannya perdagangan bebas, misalnya dalam lingkup negara-negara

ASEAN, mau tidak mau dunia pendidikan di Indonesia harus menghasilkan lulusan yang siap kerja agar tidak menjadi “budak” di negeri sendiri. Pendidikan model ini juga membuat siswa memperoleh keterampilan teknis yang komplit dan detail, mulai dari bahasa asing, komputer, internet sampai tata pergaulan dengan orang asing dan lain-lain. Sisi positif lain dari liberalisasi pendidikan yaitu adanya kompetisi. Sekolah-sekolah saling berkompetisi meningkatkan kualitas pendidikannya untuk mencari peserta didik.

Globalisasi seperti gelombang yang akan menerjang, tidak ada kompromi, kalau kita tidak siap maka kita akan diterjang, kalau kita tidak mampu maka kita akan menjadi orang tak berguna dan kita hanya akan jadi penonton saja. Akibatnya banyak Desakan dari orang tua yang menuntut sekolah menyelenggarakan pendidikan bertaraf internasional dan desakan dari siswa untuk bisa ikut ujian sertifikasi internasional. Sehingga sekolah yang masih konvensional banyak ditinggalkan siswa dan pada akhirnya banyak pula yang gulung tikar alias tutup karena tidak mendapatkan siswa.

Implikasinya, muncullah model-model pendidikan seperti:

- a) *Home schooling*, yang memenuhi harapan siswa dan orang tua karena tuntutan global.
- b) *Virtual School/University (Model Cross Border Supply)*, yaitu pembelajaran jarak jauh (*distance learning*), pendidikan maya (*virtual education*) yang diadakan oleh Perguruan Tinggi Asing; contohnya United Kingdom Open University dan Michigan Virtual University.
- c) *Model Consumption Aboard*, lembaga pendidikan suatu negara menjual jasa pendidikan dengan menghadirkan konsumen dari negara lain; contoh: banyak anak muda Indonesia menuntut ilmu membeli jasa pendidikan ke lembaga-lembaga pendidikan ternama yang ada di luar negeri.
- d) *Model Movement of Natural Persons*. Dalam hal ini lembaga pendidikan di suatu negara menjual jasa pendidikan ke konsumen di negara lain dengan cara mengirimkan personelnnya ke negara konsumen. Contohnya dengan

mendatangkan dosen tamu dari luar negeri bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia (tidak gratis tentunya).

e) *Model Commercial Presence*, yaitu penjualan jasa pendidikan oleh lembaga di suatu negara bagi konsumen yang berada di negara lain dengan mewajibkan kehadiran secara fisik lembaga penjual jasa dari negara tersebut.

Persaingan untuk menciptakan negara yang kuat terutama di bidang ekonomi, sehingga dapat masuk dalam jajaran raksasa ekonomi dunia tentu saja sangat membutuhkan kombinasi antara kemampuan otak yang mumpuni disertai dengan keterampilan daya cipta yang tinggi. Salah satu kuncinya adalah globalisasi pendidikan yang dipadukan dengan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Selain itu hendaknya peningkatan kualitas pendidikan hendaknya selaras dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Tidak dapat kita pungkiri bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, untuk dapat menikmati pendidikan dengan kualitas yang baik tadi tentu saja memerlukan biaya yang cukup besar. Tentu saja hal ini menjadi salah satu penyebab globalisasi pendidikan belum dirasakan oleh semua kalangan masyarakat.

Sebagai contoh untuk dapat menikmati program kelas Internasional di perguruan tinggi terkemuka di tanah air diperlukan dana lebih dari 50 juta. Alhasil, hal tersebut hanya dapat dinikmati golongan kelas atas yang mapan. Dengan kata lain yang maju semakin maju, dan golongan yang terpinggirkan akan semakin terpinggirkan dan tenggelam dalam arus globalisasi yang semakin kencang yang dapat menyeret mereka dalam jurang kemiskinan. Masyarakat kelas atas menyekolahkan anaknya di sekolah – sekolah mewah di saat masyarakat golongan ekonomi lemah harus bersusah payah bahkan untuk sekedar menyekolahkan anak mereka di sekolah biasa. Ketimpangan ini dapat memicu kecemburuan yang berpotensi menjadi konflik sosial. Peningkatan kualitas pendidikan yang sudah

tercapai akan sia-sia jika gejolak sosial dalam masyarakat akibat ketimpangan karena kemiskinan dan ketidakadilan tidak diredam.

Selain itu, ketidaksiapan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan bertaraf internasional dan ketidaksiapan guru yang berkompeten dalam menyelenggarakan pendidikan tersebut merupakan perpaduan yang klop untuk menghasilkan lulusan yang tidak siap pula berkompetisi di era globalisasi ini alias lulusan yang kurang berkualitas. Seperti yang dilansir *KOMPAS.com* tanggal 28 Oktober 2009 menyebutkan bahwa tiga hasil studi internasional menyatakan, kemampuan siswa Indonesia untuk semua bidang yang diukur secara signifikan ternyata berada di bawah rata-rata skor internasional yang sebesar 500. Jika dibandingkan dengan siswa internasional, siswa Indonesia hanya mampu menjawab soal dalam kategori rendah dan sedikit sekali, bahkan hampir tidak ada yang dapat menjawab soal yang menuntut pemikiran tingkat tinggi. Hasil tiga studi tersebut mengemuka dalam seminar Mutu Pendidikan dan Menengah Hasil Penelitian Puspendik 2009 di Gedung Depdiknas, Jakarta, 28 Oktober 2009.

Masih dalam *Kompas.com* tanggal 28 Oktober 2009 menyebutkan salah satu penelitian yang mengungkap lemahnya kemampuan siswa, dalam hal ini siswa kelas IV SD/MI, adalah penelitian Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS), yaitu studi internasional dalam bidang membaca pada anak-anak di seluruh dunia yg disponsori oleh The International Association for the Evaluation Achievement. Hasil studi menunjukkan bahwa rata-rata anak Indonesia berada pada urutan keempat dari bawah dari 45 negara di dunia. Demikian hasil studi tersebut dipaparkan dalam laporan penelitian “Studi Penilaian Kemampuan Guru Melalui Video dengan Memanfaatkan Data PIRLS” oleh Prof Dr Suhardjono dari Pusat Penelitian Pendidikan Depdiknas di Jakarta, Rabu (28/10). Dalam laporan tersebut, Suhardjono menuturkan, muara dari lemahnya pembelajaran membaca patut diduga karena kemampuan guru dan kondisi sekolah.

Dalam lansiran lain di *Kompas.com* tanggal 19 Juni 2009 Ir Hafilia R. Ismanto MM., Direktur Bidang Akademik LBPP LIA, menyebutkan bahwa sampai

saat ini masih banyak guru belum berhasil untuk dijadikan role model sebagai pengguna Bahasa Inggris yang baik, penyebab hal tersebut karena selama ini pihak sekolah dan guru belum melakukan pendekatan integrasi antara content atau mata pelajaran dan Bahasa Inggris. Tidak semua guru mata pelajaran bisa diberdayakan untuk memberikan materi berbahasa Inggris, kecuali para guru itu memang benar-benar siap.

Dengan demikian, pada akhirnya, pihak sekolah tidak bisa hanya begitu saja memasarkan produk-produk di sekolahnya yang “muluk-muluk” apabila kemudian di sekolahnya itu memang belum bisa menunjukkan kehebatannya seperti yang diiklankan di publik, termasuk publik internasional.

B. Manajemen Pendidikan di Indonesia

1. Strategi Pendidikan Nasional

Pembangunan Pendidikan Nasional Indonesia mendapat roh baru dalam pelaksanaannya sejak disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selaras dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional maka Visi Pembangunan Pendidikan Nasional adalah “Terwujudnya Manusia Indonesia Yang Cerdas, Produktif dan Berakhlak Mulia.”

Beberapa indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam pembangunan pendidikan nasional adalah sebagai berikut:

- 1) Sistem pendidikan yang efektif, efisien.
- 2) Pendidikan Nasional yang merata dan bermutu.
- 3) Peran serta masyarakat dalam pendidikan.

Permasalahan klasik di dunia pendidikan dan sampai saat ini belum ada langkah-langkah strategis dari pemerintah untuk mengatasinya antara lain;

- 1) Kurangnya Pemerataan kesempatan pendidikan. Sebagian besar masyarakat merasa hanya memperoleh kesempatan pendidikan masih terbatas di tingkat sekolah dasar.

- 2) Rendahnya tingkat relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Hal ini dapat dilihat dari jumlah angka pengangguran yang semakin meningkat di Indonesia, yang kenyataannya tidak hanya dipengaruhi oleh terbatasnya lapangan kerja. Namun adanya perbedaan yang cukup besar antara hasil pendidikan dan kebutuhan kerja.
- 3) Rendahnya mutu pendidikan. Untuk indikator rendahnya mutu pendidikan dapat dilihat dari tingkat prestasi siswa. Semisal kemampuan membaca, pelajaran IPA dan Matematika. Studi The Third International Mathematic and Science Study Repeat (TIMSS-R) pada tahun 1999 menyebutkan bahwa diantara 38 negara prestasi siswa SMP Indonesia berada pada urutan 32 untuk IPA dan 34 untuk Matematika.

Untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan di atas, pemerintah melalui kebijakan pembangunan pendidikan antara lain:

- 1) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti.
- 2) Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan.
- 3) Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional.

- 4) Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai.
- 5) Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen.
- 6) Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- 7) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensinya.
- 8) Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal.

Kemudian kebijakan tersebut dituangkan ke dalam program-program pembangunan antara lain:

- 1) Program Pendidikan Dasar dan Prasekolah
- 2) Program Pendidikan Menengah
- 3) Program Pendidikan Tinggi
- 4) Program Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah
- 5) Program Sinkronisasi dan Koordinasi Pembangunan Pendidikan Nasional
- 6) Program Penelitian, Peningkatan Kapasitas, dan Pengembangan Kemampuan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

7) Program Peningkatan Kemandirian dan Keunggulan Iptek

Sedangkan untuk Manajemen pendidikan nasional terbagi ke dalam 4 bagian, yaitu: Pertama, membahas masalah pokok pengembangan Sistem Pendidikan Nasional, yang mengacu kepada UU No. 2 tahun 1989 tentang Sisdiknas. Menurutnya Sisdiknas perlu dikelola sebagai suatu sub sistem dari sistem manajemen pembangunan nasional. Dalam hal ini Tilaar mengusulkan gagasan untuk menyusun suatu sistem pendidikan dan pelatihan nasional terpadu (Sisdiklatnas), alasannya adalah karena masalah tenaga kerja terampil telah dan akan merupakan masalah serius yang perlu segera ditanggulangi.

Kedua, bagian ini dikemukakan tiga kasus manajemen pendidikan yang menyangkut fungsi dan peran pendidikan swasta, pendidikan tinggi dan pendidikan di daerah terpencil. Mengenai pendidikan swasta mengambil kasus lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh PGRI, yaitu dibahas mengenai kemitraan pendidikan swasta dalam Sisdiknas dalam usaha mencari jati diri dari lembaga-lembaga pendidikan itu. Menurut Tilaar kebijakan pengembangan dan pengelolaan pendidikan swasta dewasa ini cenderung menuju konformisme yang berarti mematikan jati diri pendidikan swasta sendiri. Konformisme akan mematikan kreativitas, inovasi yang justru merupakan pupuk bagi suatu kehidupan yang dinamis.

Mengenai pendidikan tinggi memerlukan orientasi kelembagaan dan program secara terus menerus kepada dinamika masyarakat Indonesia. Oleh karena itu diperlukan manajemen yang sesuai dengan dan tentunya manajer-manajer pendidikan yang profesional. Dan mengenai pendidikan daerah terpencil berkisar pada masalah pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan.

Ketiga, Tilaar menjelaskan pertama tentang hasil manajemen pendidikan, yaitu kesenjangan mutu pendidikan dan tenaga pendidik yang menjalankan dan mengelola sisdiknas, khususnya tenaga guru pada jenjang SD. Kedua, tentang

pendidikan dalam globalisasi, dimana Tilaar menghimbau negara-negara berkembang tentang perlunya terobosan baru dalam strategi pendidikan guru. Diantaranya dikemukakan tentang pendidikan guru yang profesional untuk menghadapi masyarakat teknologi dan informasi, serta profesi guru sebagai manajer pendidikan untuk mempersiapkan masyarakat masa depan.

Keempat, bagian ini Tilaar mengemukakan pemikirannya tentang fungsi dan peran Sisdiknas sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional jangka panjang kedua, untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia memasuki dan menghadapi masyarakat industri modern. Dalam hal ini Tilaar mengemukakan sepuluh kecenderungan (*megatrends*) dari Sisdiknas. Yang salah satunya adalah mengenai manajemen pendidikan yang rasional, terpadu, serta dikelola para manajer pendidikan yang profesional.

Salah satu masalah pendidikan yang kita hadapi dewasa ini adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kualifikasi guru, penyediaan dan perbaikan sarana/prasarana pendidikan, serta peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang merata. Sebagaimana sekolah, terutama di kota-kota, menunjukkan peningkatan mutu yang cukup menggembirakan, namun Sebagian lainnya masih memprihatinkan. Dari berbagai pengamatan dan analisis, sedikitnya ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata.

Pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan *educational production function* yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Pendekatan ini melihat bahwa lembaga pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila dipilih semua input (masukan) yang diperlukan dalam kegiatan produksi tersebut, maka lembaga ini akan menghasilkan output yang dikehendaki. Dalam kenyataan, mutu pendidikan

yang diharapkan tidak terjadi, mengapa? Karena selama ini dalam menerapkan pendekatan *education-production-function* terlalu memusatkan pada input pendidikan dan kurang memperhatikan pada proses pendidikan. Padahal, proses pendidikan sangat menentukan *output* pendidikan.

Kedua, penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik, sehingga sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi, yang kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Dengan demikian sekolah kehilangan kemandirian, motivasi, dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya termasuk peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional.

Ketiga, peran serta masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim. Partisipasi masyarakat pada umumnya selama ini lebih banyak bersifat dukungan dana, bukan pada proses pendidikan (pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas). Berkaitan dengan akuntabilitas, sekolah tidak mempunyai beban untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat, khususnya orang tua siswa, sebagai salah satu pihak utama yang berkepentingan dengan pendidikan.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan, salah satunya yang sekarang sedang dikembangkan adalah reorientasi penyelenggaraan pendidikan, melalui manajemen berbasis sekolah (*School Based Management*).

Manajemen berbasis sekolah dapat didefinisikan dan penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan mutu sekolah dalam pendidikan nasional.

Esensi dari MBS adalah otonomi dan pengambilan keputusan partisipasi untuk mencapai sasaran mutu sekolah. Otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan (kemandirian) yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Jadi, otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Kemandirian yang dimaksud harus didukung oleh sejumlah kemampuan, yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan yang terbaik, kemampuan berdemokrasi/menghargai perbedaan pendapat, kemampuan memobilisasi sumber daya, kemampuan memilih cara pelaksanaan.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) bertujuan untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan, keluwesan, dan sumber daya untuk meningkatkan mutu sekolah. Dengan demikian, secara bertahap akan terbentuk sekolah yang memiliki kemandirian tinggi

2. Guru dan Kualitas Pendidikan

Guru merupakan faktor penentu tinggi rendahnya kualitas hasil pendidikan. Namun demikian, posisi strategis guru untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan profesional, faktor kesejahteraannya, dll. Dewasa ini persoalan guru masih ada muncul yaitu dengan jumlah kekurangan guru yang cukup besar khususnya di daerah-daerah terpencil maka kita juga tidak dapat berharap akan terciptanya kualitas pendidikan.

Disamping itu masalah distribusi guru juga tidak merata, baik dari sisi daerah maupun dari sisi sekolah. Dalam banyak kasus, ada SD yang hanya memiliki tiga hingga empat orang guru sehingga mereka harus mengajar secara paralel dan simultan.

Belum lagi hal yang berkaitan dengan prasyarat akademis, baik itu menyangkut pendidikan minimal maupun kesesuaian latar belakang bidang studi dengan pelajaran yang harus diberikan. Semisal, masih cukup banyak guru

SMA/SMK yang belum berkualifikasi pendidikan sarjana atau strata satu. Seperti yang bersyaratkan dalam UU Guru dan Dasar.

Sejak awal pembahasan UU Guru dan Dosen, pertanyaan yang banyak muncul di masyarakat luas adalah : “Untuk siapa UU Guru dan Dosen tersebut?” Hal ini mengemuka karena ada kekhawatiran UU tersebut tidak dapat memayungi seluruh guru. Dengan kata lain ditakutkan adanya proses diskriminasi antara guru PNS dan guru swasta. Khusus posisi guru swasta selama ini memang seolah-olah tidak dipayungi oleh UU yang ada meskipun secara eksplisit sudah tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dari sudut UU kepegawaian jelas tidak menhususkan untuk guru, karena yang diatur adalah pegawai pemerintah (PNS) sedangkan dari sudut UU Ketenagakerjaan juga akan sangat sulit karena penyelenggara pendidikan adalah yayasan. Sehingga guru tidak dapat dikategorikan sebagai tenaga kerja atau buruh. Bisa dikatakan sebelum UU Guru dan Dosen disahkan, guru-guru tidak mempunyai payung hukum yang jelas. Yang memang mengatur segala sesuatu secara khusus yang menyangkut guru, seperti halnya dengan UU Tenaga Kerja dan UU Kepegawaian.

UU Guru dan Dosen mendapatkan sambutan yang hangat, terutama dari kalangan pendidik. UU ini dianggap bisa menjadi payung hukum untuk guru dan dosen tanpa adanya perlakuan yang berbeda antara guru negeri dan swasta. Meskipun di beberapa bagian masih sangat hangat diperbincangkan dan menjadi perdebatan yang sangat seru. UU Guru dan Dosen secara gamblang dan jelas mengatur secara detail aspek-aspek yang selama ini belum diatur secara rinci. Semisal, kedudukan, fungsi dan tujuan dari guru, hak dan kewajiban guru, kompetensi dll. Yang perlu digaris bawahi dan mendapat sambutan positif dari masyarakat terhadap UU Guru dan Dosen adalah hal-hal yang menyangkut :

- 1) Kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi.
- 2) Hak dan kewajiban.
- 3) Pembinaan dan pengembangan.

- 4) Penghargaan,
- 5) Perlindungan
- 6) Organisasi profesi dan kode etik.

Ada beberapa hal dalam UU Guru dan Dosen yang sampai saat ini masih hangat dibicarakan, hal-hal tersebut adalah:

a. Standardisasi Penyelenggaraan Pendidikan

Sampai saat ini cukup banyak penyelenggara pendidikan (yayasan-yayasan) yang tidak jelas keberadaannya. Dalam pelaksanaannya banyak lembaga pendidikan yang belum memenuhi standar mutu pelayanan pendidikan dan standart mutu pendidikan yang diharapkan. Hal ini disebabkan yayasan-yayasan tersebut terkesan memaksakan diri untuk mendirikan lembaga pendidikan, sehingga banyak lembaga pendidikan yang tidak layak, karena sarana dan prasarana pendidikan yang jauh dari memadai, guru yang tidak kompeten, organisasi yang tidak dikelola dengan baik, dll. Penyelenggara pendidikan seperti diatas jumlahnya cukup besar di Indonesia. Dengan lahirnya UU Guru dan Dosen diharapkan dapat menjadi acuan untuk memperbaiki kualitas mutu pelayanan pendidikan di masyarakat baik itu negeri maupun swasta.

b. Standardisasi Kompetensi Guru

Hal ini akan tercantum pada pasal 8 UU Guru dan Dosen yang menjelaskan tentang Sertifikat Profesi Pendidik. Pasal 8 menyebutkan : "Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional". Banyak pihak mengkhawatirkan program sertifikasi ini (yang diselenggarakan oleh LPTK) nantinya akan menimbulkan masalah baru di dunia pendidikan, terutama yang mengarah pada terciptanya lembaga yang menjadi sarang kolusi dan korupsi baru. Yang pada akhirnya akan memperburuk kondisi pendidikan bangsa. Sedang semangat dari pasal ini adalah untuk meningkatkan kompetensi pendidik itu

sendiri, serta berusaha lebih menghargai profesi pendidik. Dengan sertifikasi diharapkan lebih menghargai profesi guru, dan meningkatkan mutu guru di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai langkah menjadikan guru sebagai tenaga profesional.

c. Kesejahteraan atau Tunjangan

11 item Hak Guru yang tercantum pada pasal 14 UU Guru dan Dosen adalah bentuk penghargaan pemerintah dan masyarakat kepada guru. Untuk indikator penghasilan guru PNS sudah diatur Pasal 15 ayat 1. Guru berhak untuk mendapatkan tunjangan, yaitu:

- 1) Tunjangan profesi.
- 2) Tunjangan Fungsional.
- 3) Tunjangan Khusus.

Tiga jenis tunjangan diatas diatur dalam pasal 16, 17 dan 18 UU Guru dan Dosen. Tunjangan profesi diberikan kepada guru baik guru PNS ataupun guru swasta yang telah memiliki sertifikat pendidik.

Disamping tunjangan diatas, guru juga berhak untuk memperoleh "maslahat tambahan" yang tercantum dalam pasal 19 UU Guru dan Dosen. Maslahat Tambahan tersebut meliputi:

- 1) Tunjangan pendidikan.
- 2) Asuransi pendidikan.
- 3) Beasiswa.
- 4) Penghargaan bagi guru.
- 5) Kemudahan bagi putra-putri guru untuk memperoleh pendidikan.
- 6) Pelayanan kesehatan.
- 7) Bentuk kesejahteraan lain.

UU Guru dan Dosen mungkin masih harus di perdebatkan dalam rangka memperbaikinya di masa yang akan datang. Apalagi ada beberapa hal memang tidak serta merta dapat dilaksanakan. Pemberian tunjangan kepada seluruh guru,

akan sangat tergantung anggaran pemerintah. Sehingga pada saat anggaran pendidikan belum mencapai 20% dari APBN maka akan sangat sulit dilaksanakan. Demikian pula dengan program sertifikasi dll, masih memerlukan proses untuk pelaksanaan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Namun diharapkan dengan adanya 2 (dua) undang-undang yaitu Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Guru dan Dosen diharapkan akan memperbaiki mutu pendidikan nasional secara keseluruhan.

4. Pendidikan Indonesia di Tengah Globalisasi

Istilah globalisasi sering digunakan untuk menggambarkan penyebaran dan keterkaitan produksi, komunikasi, dan teknologi di seluruh dunia. Penyebaran ini melibatkan kompleksitas kegiatan ekonomi dan budaya.

Globalisasi mempunyai dimensi ekonomis, politis, kultural, dan sosial. Sebagai akibat dari kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, kehidupan dunia saat ini tidak lagi mempunyai sekat antar negara. Hal ini adalah konsekuensi logis dari semakin meningkat dan kompleksnya kebutuhan manusia dalam seluruh aspek kehidupan. Keterbukaan tersebut melahirkan era globalisasi dengan kehidupan tanpa batas di dalamnya, posisi Indonesia sebagai negara berkembang akan tergerus dalam arus tersebut jika tidak melakukan manuver-manuver guna merespons tantangan global, salah satunya dengan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul. Masyarakat dunia menyadari bahwa pendidikan merupakan hal yang urgen dalam membangun sumber daya manusia yang unggul tersebut.

Pemerintah Indonesia pun menyadari bahwa pendidikan berperan penting dalam pembangunan manusia Indonesia guna menghadapi kuatnya arus globalisasi, terbukti dengan adanya kebijakan wajib belajar 12 tahun sebagai pendidikan dasar yang wajib ditempuh oleh seluruh masyarakat Indonesia yang disebut dengan istilah PMU (Pendidikan Menengah Universal). Peningkatan kualitas pendidikan juga dilaksanakan dengan berbagai cara, termasuk

mengalokasikan 20% dari APBN untuk sektor pendidikan, Ujian Nasional (UN) sebagai tolak ukur dan standardisasi pencapaian kualitas pendidikan, dan ditetapkannya UU Nomor 14 Tahun 2005, tentang guru dan dosen. Hal ini menjadi bukti konkret pemerintah Indonesia dalam menyiapkan generasi bangsa. Namun, kita perlu melakukan koreksi besar-besaran terhadap pencapaian tersebut.

Pendidikan merupakan aspek penting dalam era globalisasi. Paling tidak ada tiga persoalan pokok yang sangat berpengaruh dalam perkembangan dunia pendidikan yaitu:

- 1) Masalah peningkatan mutu manusia dan masyarakat Indonesia.
- 2) Menyangkut masalah globalisasi.
- 3) Perkembangan dan kemajuan teknologi.

Peningkatan SDM, yang menjadi tugas dan tanggung jawab utama pendidikan, sangat dipengaruhi faktor globalisasi dan teknologi. Pengaruh globalisasi, kemajuan teknologi dan informasi serta perubahan nilai-nilai sosial harus diperhitungkan dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya pada otonomi sekolah, dalam rangka menjalankan tanggung jawab dunia pendidikan untuk mencapai tujuan pokok melahirkan manusia yang berkualitas.

Peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia kembali perlu dipertanyakan pencapaiannya karena indeks pembangunan pendidikan di Indonesia mengalami penurunan. Jika pada 2010 lalu Indonesia berada di peringkat 65, maka di tahun 2015 perolehan Indonesia merosot ke peringkat 69. Berdasarkan data dalam Education For All (EFA) Global Monitoring Report 2011, indeks pembangunan pendidikan Indonesia berdasarkan data tahun 2008 adalah 0,934. Nilai ini menempatkan Indonesia di posisi ke-69 dari 127 negara di dunia, yang artinya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia belum menemukan titik yang jelas, sekalipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN sejak tahun 2009.

Memasuki Era Globalisasi tidaklah cukup hanya dengan mengikuti perkembangan dan kemajuan yang diciptakan bangsa lain, melainkan juga harus

mampu memilih dan ikut menyediakan pilihan alternatif dalam proses perubahan tersebut. Kualitas pendidikan tercipta ketika penyelenggaraan pendidikan mampu menghasilkan luaran yang memuaskan konsumen pendidikan itu sendiri, yakni masyarakat, orang tua, dan pihak yang berkepentingan. Kesesuaian antara hasil dan kepuasan pelanggan inilah yang menjadi indikator mutu setiap sekolah.

Tantangan internal yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah keterjangkauan masyarakat terhadap pendidikan. Lemahnya perekonomian sebagian besar masyarakat Indonesia menjadi alasan banyaknya siswa putus sekolah, terutama di Sekolah Dasar (SD). Dalam Education Development Index yang dikeluarkan UNESCO tahun 2011, Indonesia mengalami penurunan dengan nilai 0,862 dibanding tahun 2010 mencapai 0,928. Tercatat 720.000 (18,4 %) lulusan SD yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah pertama tiap tahunnya (Kompas, 04/05/2011).

Pendidikan adalah produk budaya, dan budaya tercipta dari masyarakat yang berpendidikan. Pendidikan tidak bisa dilepaskan dari proses pembudayaan masyarakat sehingga standar pendidikan yang ada di suatu negara harus mengacu pada kebudayaan dan kebutuhan masyarakatnya. Indonesia adalah negara yang mempunyai identitas dan jati diri. Jangan bermimpi menjadi lebih baik jika kita terus-menerus berkiblat kepada bangsa lain. Salah satu kuncinya keberhasilan dibidang pendidikan pada era –globalisasi adalah dengan memadukan globalisasi dengan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Selain itu peningkatan kualitas pendidikan hendaknya selaras dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Tidak dapat pungkiri bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, untuk dapat menikmati pendidikan dengan kualitas yang baik tentu saja memerlukan biaya yang cukup besar. Tentu saja hal ini menjadi salah satu penyebab globalisasi pendidikan belum dirasakan oleh semua kalangan masyarakat.

Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses

dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Globalisasi sering diterjemahkan “mendunia” atau “mensejagat”, yaitu dengan cepat menyebar keseluruh plosok dunia, baik berupa ide, gagasan, data, informasi, dan sebagainya begitu disampaikan saat itu pula diketahui oleh semua orang diseluruh dunia. Globalisasi selain menghadirkan ruang positif namun juga terdapat sisi negatifnya. Globalisasi adalah merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi dan dikontekskan pada keadaan yang ada pada masa kini.

Globalisasi telah menciptakan dunia yang semakin terbuka dan saling ketergantungan antar negara dan antar bangsa. Negara atau bangsa dunia kini bukan saja saling terbuka terhadap satu sama lain, tetapi juga saling ketergantungan satu sama lain dan itu bersifat asimetris, artinya satu negara lebih tergantung pada negara lain daripada sebaliknya. Karena saling ketergantungan dan saling keterbukaan ini, semua negara pada prinsipnya akan terbuka terhadap pengaruh globalisasi. Dan efek yang ditimbulkan adalah akan masuknya secara bebas nilai-nilai moral, sosial budaya, dan sebagainya yang akan berdampak pada ranah pendidikan yang cenderung akan banyaknya nilai-nilai negatif yang masuk tanpa adanya penyaringan.

Derasnya arus globalisasi akan melanda setiap sendi kehidupan manusia dimanapun dia berada. Keadaan apapun tidak bisa menolak dan menghindar, mau tidak mau harus dihadapi. Hanya bangsa yang mawas diri sajalah yang bisa menghadapinya. Pendidikan merupakan benteng untuk menghadang derasnya arus globalisasi. Manajemen pendidikan nasional yang rapih merupakan strategi jitu untuk mengatasi dampak negatif globalisasi, juga akan mengarahkan globalisasi ke arah yang positif bagi pembangunan bangsa.

Globalisasi terjadi karena tuntutan zaman, oleh karena itu menurut Ali Idrus (2009). Proses pendidikan tidak hanya mempersiapkan anak didik untuk mampu hidup dalam masyarakat kini, tetapi mereka harus disiapkan untuk hidup

di masyarakat yang akan datang disebabkan oleh kenyataan bahwa di era-globalisasi ini perkembangan masyarakat tidak linear lagi, dan penuh dengan diskontinuitas.

Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa- bangsa di seluruh dunia. Menurut Edison A. Jamli dkk. (2005) Globalisasi ditandai oleh ambivalensi – yaitu tampak sebagai “berkah” di satu sisi tetapi sekaligus menjadi “kutukan” di sisi lain. Tampak sebagai “kegembiraan” pada satu pihak tetapi sekaligus menjadi “kepedihan” di pihak lainnya. Globalisasi pendidikan di Indonesia juga ditandai oleh ambivalensi yaitu berada pada kebingungan, karena ingin mengejar ketertinggalan untuk menyamai kualitas pendidikan Internasional, kenyataannya Indonesia belum siap untuk mencapai kualitas tersebut. Padahal kalau tidak ikut arus globalisasi ini Indonesia akan semakin tertinggal.

Munculnya istilah globalisasi/liberalisasi pendidikan tinggi bermula dari WTO yang menganggap pendidikan tinggi sebagai jasa yang bisa diperdagangkan atau diperjualbelikan. Tiga negara yang paling mendapatkan keuntungan besar dari liberalisasi jasa pendidikan adalah Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Australia (Enders dan Fulton, Eds., 2002).

Alhasil, pendidikan memiliki keterkaitan erat dengan globalisasi. Dalam proses menuju era globalisasi itulah, Indonesia harus melakukan reformasi dalam proses pendidikan, yaitu dengan tekanan menciptakan sistem pendidikan yang lebih komprehensif dan fleksibel, sehingga para lulusan dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan masyarakat global. Oleh karena itu, pendidikan harus dirancang sedemikian rupa agar memungkinkan para anak didik dapat mengembangkan potensi yang dimiliki secara alami dan kreatif dalam suasana penuh kebebasan, kebersamaan dan tanggung jawab. Selain itu, pendidikan

harus dapat menghasilkan lulusan yang bisa memahami masyarakatnya dengan segala faktor yang dapat mendukung mencapai sukses ataupun penghalang yang menyebabkan kegagalan di dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan yaitu dengan pengelolaan pendidikan Indonesia yang berwawasan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. 2004. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ali, M. 1992. *Pengembangan Kurikulum di Sekolah*. Bandung: Sinar Baru.
- Arikunto, Suharsimi dan Yuliana, Lia. 2008. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Atosokhi, Antonius, dkk. 2004. *Character Building II: Relasi dengan Sesama*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Bafadhol, Ibrahim. 2005. *Dasar-dasar Manajemen dan Supervisi Taman Kanak-kanak*. Jakarta: PT Bumi aksara.
- Burgess, E.W. 1929. *Personality and the Social Group*. Chicago: University of Chicago Press.
- Centers, Richard. 1949. The Psychology of Social Classes in *American Journal of Sociology*, Vol. 55 No. 2. Chicago: University of Chicago Press.
- Costa, Vincent P. 2000. *Panduan Pelatihan untuk Mengembangkan Sekolah*, Jakarta: Depdiknas.
- Dakir. 2004. *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Danim, Sudarwan, dan Khairil. 2011. *Profesi Kependidikan*. Bandung. CV Alfabeta.
- Daryanto, H.M. 2005. *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2009. *Buku Pedoman Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

- Dewey, John. 1926. *Democracy and Education*. New York: Macmillan.
- Dewey, John. 1899. *The School and Society*. Chicago: University of Chicago Press.
- Fattah, Nanang. 2006. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Fattah, Nanang. 2008. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Goldsmith, Marshall; Morgan, Howard; and Ogg, Alexander J. (eds.). 2004. *Leading Organizational Learning: Harnessing the Power of Knowledge*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Goode, William, J. 2007. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Grey, Christopher and Antonacopoulou, Elena (eds.). 2003. *Essential Readings in Management Learning*, London: Sage Publications.
- Guruge, Ananda WP. 1970. *Towards A Better Educational Management*, International Education Year.
- Hamalik, Oemar. 2008. *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Hasbullah. 1999. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: RajaGrafindo.
- Hasibuan, Malayu S.P. 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bina Rupa Aksara.
- Horton, Paul B, & Chester L. Hunt. 1991. *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga.
- Idi, Abdullah. 1999. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Gaya Media Pratama.
- Idrus, Ali. 2009. *Manajemen Pendidikan Global: Visi, Aksi, dan Adaptasi*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Ihsan, Fuad. 2008. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Indrafachrudi, Soekarto. 1994. *Bagaimana Mengakrabkan Sekolah dengan Orang tua Murid dan Masyarakat*. Malang: IKIP.
- Kadarman, A.M. dan Udaya, Jusuf. 1992. *Pengantar Ilmu Manajemen: Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Koontz, Harold; O'Donnell, Cyril; and Wehrich, Heinz, 1986, *Essentials of Management*. New York: McGraw-Hill.
- Latif, Abdul. 2007. *Pendidikan Berbasis Nilai Kemasyarakatan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Manullang, M. 1990. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mead, George Herbert. 1950. *Mind, Self, and Society*. Chicago: University of Chicago Press.
- Muchdarsyah Sinungan. 1993. *Dasar-Dasar Management Kredit*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyana, Nurhadi. 1983. *Administrasi Pendidikan Di Sekolah*, cetakan ketujuh. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mulyasa, Endang. 2007. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa. 2007. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung. Remaja Rosda Karya.
- Narwoko, J Dwi, & Bagong Suyanto. 2010. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*. cetakan ketiga. Jakarta: Kencana.
- Nasution, S. 2008. *Asas-Asas Kurikulum*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Edisi II, Cet. Ke-9.
- Newcomb, T.M. 1943. *Personality and Social Change*. New York: Dryden Press.

Nurgiyanto, Burhan. 1988. *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah*. Yogyakarta: BPFE.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2008 Tentang Pembiayaan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah RI. No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Peters, Ch. C. 1927. *Foundations of Educational Sociology*. New York: Macmillan.

Pidarta, Made. 2004. *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.

PP No. 48 Tahun 2008 tentang *Pendanaan Pendidikan*. Jakarta: Depdiknas.

Purwanto, Ngalm. 2005. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Rivai, Moh. 1982. *Administrasi Pendidikan Dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: Jenmars.

Rochaety, Eti; Rahayuningsih Pontjorini; Gusti Yanti Prima. 2005. *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Rohiat, 2010, *Manajemen Sekolah, Teori Dasar dan Praktik*, Bandung: PT Refika Aditama.

Ruslan, Rosady. 2008. *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Rusman. 2009. *Manajemen Kurikulum*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Sahertian, Piet A. dan Ida Alcida Sahertian. 1987. *Supervisi Dalam Rangka Pembinaan dan Peningkatan Profesi Mengajar*. Malang: IKIP Malang.

- Sallis, Edward. 2006. *Total Quality Management in Education*, terjemahan. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Semiawan, Conny R. 2008. *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Raja Gafindo Perkasa.
- St. John, Edward P. 2006. *Education and Public Interest: School Reform, Public Finance and Access to Higher Learning*. Dordrecht: Springer.
- Stoner, James AF., dan R. Edward Freeman. 1992. *Manajemen*, Jakarta: Intermedia.
- Sudjana, Nana. 1991. *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*. Bandung: CV. Sinar Baru Algesindo.
- Sugiarto. 2002. *Pengantar Akuntansi*. Pusat Penerbitan Universitas Terbuka. Jakarta.
- Suherma, Adang, dan Agus Mahendra. 2001. *Menuju Perkembangan Menyeluruh, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Olahraga*.
- Sukirman, Hartati. 2000. *Manajemen Tenaga Pendidikan*. Yogyakarta: FIP UNY.
- Sulistiyani, Ambar Teguh dan Rosidah. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Konsep, Teori dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Surjadi. 1982. *Sekolah dan Pembangunan*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Surya Dharma. 2007. *Manajemen Keuangan Sekolah*. Jakarta: Depdiknas.
- Suryosubroto. 2004. *Manajemen Pendidikan Di Sekolah*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sutopo, Hendyat. 1999. *Manajemen dan Organisasi Sekolah*. Malang: IKIP Malang.
- Swastha, Basu. 1985. *Azas-azas Manajemen Modern*. Yogyakarta: Liberty.

- Syaibani, Omar Muhammad al-Toumi. 1979. *Falsafah Pendidikan Islam*. Terj. Hasan Langgulung. Jakarta: Bulan Bintang.
- Tafsir, Ahmad. 1992. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. 2009. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan FIP Malang cet-2. 1989. *Administrasi Pendidikan*. Malang: IKIP Malang.
- Tim Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan. 2005. *Pengelolaan Pendidikan*. Bandung: UPI.
- Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: CV. Tamita Utama.
- Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Widiyanti, Ninik. 1998. *Manajemen Koperasi*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Wiles, B., and Bondi, J. 1989. *Curriculum Development: A Guide to Practice*, Columbus: Merrill Publications, Co.
- Wiryokusumo, Iskandar. 1988. *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*. Jakarta : Bina Aksara.
- Yamin, Martinis. 2007. *Kiat Membelajarkan Siswa*. Jakarta: Gaung Persada Press.